

# Newsletter Pusdatin



## Daftar Isi

- Sosialisasi PAT Pusdatin Menjadi *Leader* Pada Pemetaan Lahan Berbasis Geospasial, Halaman 1
- Evaluasi SPBE Kementan Finalisasi Penilaian Mandiri 2024, Halaman 3
- Sosialisasi CMS di Bali Kementan Berkomitmen Bagikan Informasi Yang Akurat, Halaman 5
- Bawang Putih Temanggung, Mati Segan Hidup Tak Mau, Halaman 6
- Serapan Tenaga Kerja Tinggi, Ciptakan Sektor Pertanian Yang Padat Karya, Halaman 9
- Temu Bisnis VIII - 400 Triliun Rupiah Transaksi Dalam 2 hari, Halaman 10

Mohon Kesediannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



[bit.ly/surveipusdatin](https://bit.ly/surveipusdatin)

## Sosialisasi PAT

### Pusdatin Menjadi *Leader* Pada Pemetaan Lahan Berbasis Geospasial

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi Penambahan Areal Tanam (PAT) melalui pelatihan pemetaan lahan berbasis geospasial untuk 38 Provinsi. Kegiatan ini diselenggarakan di 3 *Telecenter* yaitu Wilayah Barat (Sumatera Selatan), Wilayah Tengah (Bali) dan Wilayah Timur (Sulawesi Selatan) secara *hybrid*.

Kepala Pusdatin Intan Rahayu, menekankan berbagai potensi ancaman global dalam pemenuhan pangan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya percepatan peningkatan produksi padi melalui upaya PAT. "Peningkatan produksi padi ini melalui optimalisasi, pompanisasi dan tumpang sisp padi gogo di lahan perkebunan," kata Intan Rahayu dalam kegiatan sosialisasi PAT di Palembang, Sumatera Selatan Kamis (15/08/2024).



Pelatihan Pemetaan Lahan PAT Padi Wilayah Barat (Sumatera, Kalimantan)

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan pembagian wilayah. Sumatera Selatan mewakili Wilayah Barat, Bali mewakili Wilayah Tengah dan Sulawesi Selatan mewakili Wilayah Timur.

# Tim Redaksi

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan  
Sistem Informasi Pertanian

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

Dr. Nugroho Setyabudhi, S.Kom, MM  
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si  
Roydatul Zikria, S.Si, MSE  
Suyati, S.Kom

Fotografer

Sri Lestari, SE  
Iswadi

Desain Grafis

Dhanang Susatyo, SE  
Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT  
Cahyani Wartianingsih, S.Kom  
Hotlanis Mangatur S, S.Kom  
Nur Hikmah, S.Stat  
Didik Pratama Saputra, S.Kom  
Priatna Sari  
Rahma Andany, S.Kom  
Marwati  
Agung Mahendra, S.Kom  
M. Eko Darwanto

## Alamat Redaksi



PUSAT DATA DAN  
SISTEM INFORMASI PERTANIAN  
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,  
Ragunan - Jakarta 12550  
Telp : 021- 78842029  
e-mail : newsletter@pertanian.go.id



*Pelatihan Pemetaan Lahan PAT Padi Wilayah Tengah  
(Jawa, Bali, Nusa Tenggara)*

Tahapan sosialisasi PAT ini dilaksanakan dari tanggal 15-23 Agustus 2024, dan diikuti penanggung jawab PAT dan dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Plt. Sekjen Kementan) Ali Jamil, Tenaga Ahli Menteri Bidang Optimalisasi Lahan dan Pompanisasi Letjen TNI (Purn.) A.M. Putranto, Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Peningkatan Produksi Muhammad Arsyad, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS RI Eko Marsoro, dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Bambang Pramono.

Intan menjelaskan pemantauan data di lapangan dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian melalui pelaporan dari lapangan oleh Penanggung Jawab (PJ) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawal kegiatan PAT. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi laporan utama periode harian yang dilengkapi dengan titik koordinat, *polygon* dan foto lokasi kegiatan PAT padi.

Berdasarkan hasil evaluasi masih ditemukan beberapa titik koordinat yang belum sesuai dengan lokasi sebenarnya. Hal ini akibat kesalahan pengambilan titik koordinat di lapangan atau pencatatan koordinat yang kurang sesuai.

Selain itu, belum semua PJ melaporkan poligon lahan PAT dan kegiatan monitoring dan evaluasi lahan PAT berbasis geospasial ini. "Tentunya ini merupakan upaya Kementan untuk meningkatkan akurasi data realisasi PAT padi yang akan menjadi bukti dukung program PAT. Ini sesuai arahan Inspektorat

Jenderal Kementan dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar Kementan menyediakan data geospasial kegiatan PAT,” jelasnya.

Mantan Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri, Badan Siber dan Sandi Negara ini berharap penyelenggaraan Bimtek bagi peserta ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun peta lahan PAT secara efektif, efisien dan sesuai kaidah pemetaan.

Sementara itu Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt. Sekjen) Kementan Ali Jamil menekankan pentingnya PAT harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan meliputi lahan pertanaman padi program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH), pompanisasi untuk menaikkan Indeks Pertanaman dan padi gogo.



Pelatihan Pemetaan Lahan PAT Padi Wilayah Timur (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua)

“Kegiatan PAT dapat dibuktikan melalui poligon. Hal ini untuk membuktikan kepada BPSTerhadap program yang berjalan” kata Ali.

Ali menambahkan, program OPLAH dan padi gogo harus memperhatikan Indeks Pertanaman (IP), pertambahan tanam dan Luas Tambah Tanam (LTT). Sebagai contoh di Kabupaten Kapuas Hulu luas sekitar 2.100 hektare, peningkatan IP 200 ke 300. Maka luas pertanaman menjadi 300 yang harus dibuatkan poligon.

Selain itu harus juga memperhatikan periode kegiatan pada Juli-Oktober 2024 dengan pertimbangan jika ditambulkan September 2024 maka diharapkan panennya juga bisa dilakukan di tahun ini dengan masa tanam rata-rata selama 3 bulan sehingga tercatat di Kerangka Sampel Area (KSA) 2024.

Percepatan pemasangan pompa atas arahan Bapak Menteri untuk peningkatan IP yang diharapkan dapat meningkatkan

lahan tadah hujan. “Bentuk bantuan untuk pompanisasi berupa transfer barang terdiri dari selang hisap buang dan irigasi yang disalurkan melalui transfer uang ke kelompok tani”, pungkasnya.

Rangkaian pelatihan PAT ini disampaikan oleh Tim Pusdatin. Tindak lanjut dari pelatihan ini, para peserta diwajibkan melakukan pembuatan *geotagging* dan *polygon* PAT. Jika ditemukan lokasi yang meragukan atau perlu dicek ulang, maka Tim Kementan, PJ PAT, BPS, Kementerian ATR/BPN dan dinas akan turun bersama ke lapangan untuk melakukan verifikasi.

Para peserta juga diwajibkan segera melakukan pembuatan *polygon* lahan PAT dan melampirkan foto *geo-tagging* menggunakan aplikasi ArcGis *Field Map* dan disampaikan ke aplikasi laporanutama.pertanian.go.id. paling lambat 30 September 2024.

Penulis : Suyati

## Evaluasi SPBE Kementan Finalisasi Penilaian Mandiri 2024

Pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkala. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), evaluasi SPBE tahun 2024 telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan SPBE telah berjalan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2024 ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya mewujudkan

pemerintahan yang berbasis elektronik. Dalam rangka Evaluasi SPBE Kementan tahun 2024 dan sebagai kelanjutan dari rapat koordinasi (rakor) yang diadakan minggu lalu (7/8/2024), Pusdatin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Mandiri SPBE Kementan 2024 di Ruang Rapat Pusat Sosial Ekonomi Pertanian (PSEKP) Bogor pada hari Rabu (14/8/2024). Rakor mengundang semua anggota Tim Asesor SPBE Kementan yang berjumlah 48 orang yang berasal dari: Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Umum dan Pengadaan dan Biro Hukum.

Tim Asesor Internal SPBE adalah sebuah tim yang dibentuk khusus untuk melakukan penilaian terhadap penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Pertanian. Tim ini memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa SPBE yang diterapkan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Struktur Tim Asesor terdiri dari seorang penanggung jawab yang memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim, serta anggota-anggota lain yang bertugas melakukan penilaian, pengumpulan data, dan pelaporan sesuai indikator SPBE yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas utama dari Tim Asesor adalah melakukan penilaian terhadap penerapan SPBE di unit kerja. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Tim Asesor juga bertugas memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja terkait mengenai penerapan SPBE. Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPBE di Kementerian Pertanian telah berhasil. Hasil penilaian ini juga akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah perbaikan ke depannya.

Dengan adanya Tim Asesor SPBE, diharapkan kualitas penerapan SPBE di Kementerian Pertanian dapat terus ditingkatkan. Hal ini akan berdampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan pemerintahan.

Penanggung jawab Tim Asesor SPBE Kementan Bayu Mulyana dalam arahannya pada rakor mengatakan, Diharapkan dengan dukungan dari semua stakeholder dan para penanggung jawab/PIC indikator, target indeks SPBE Kementan tahun 2024 sebesar 4,26 bisa tercapai atau bahkan terlampaui.

“Indeks SPBE ini merupakan salah satu komponen penilaian yang mendukung penilaian RB Kementan dan bobot indeks SPBE untuk penilaian RB cukup besar yaitu sebesar 9. Oleh karena itu pemenuhan target indeks SPBE diharapkan dapat ikut mendongkrak capaian nilai RB Kementan”, pesan Bayu dalam kalimat penutup arahan rakor (14/8/2024).

Hasil proses rewiu dalam rakor yang memakan waktu sekitar 7 jam, dari 47 indikator Evaluasi SPBE beberapa indikator berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terakhir pada tanggal 14 Agustus 2024 masih membutuhkan perbaikan. Indikator tersebut yaitu indikator 25, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38, dan 40. Berdasarkan kesepakatan dengan PIC masing-masing indikator tersebut, perbaikan akan diselesaikan paling lambat hari Jumat (16/8/2024).



*Penanggung jawab Tim Asesor SPBE Kementan Bayu Mulyana sedang menyampaikan arahan pada Rapat Finalisasi Penilaian Mandiri SPBE*

Tim Asesor optimis perbaikan akan selesai pada waktu yang telah ditargetkan. Evaluasi SPBE tahun 2024 tidak hanya berfokus pada pengukuran capaian, namun juga pada identifikasi kendala dan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun strategi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam era digital yang terus berkembang, pemerintah juga mendorong inovasi dan adaptasi dalam penerapan SPBE. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya evaluasi SPBE secara berkala, pemerintah dapat semakin dekat dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat. Selain itu, evaluasi ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem digital yang kuat.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

## Sosialisasi CMS di Bali Kementan Berkomitmen Bagikan Informasi Pertanian

D i era digital yang terus berkembang, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengambil langkah maju dalam pengelolaan informasi melalui penerapan *Content Management System (CMS)* Kementan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan penyebaran informasi pertanian yang akurat dan terkini kepada publik.

CMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten digital tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam tentang pemrograman. CMS Kementan menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengelolaan website, termasuk pembuatan dan pengeditan konten, pengelolaan pengguna, serta penggunaan *template* dan desain yang menarik.

Dalam rangka pengelolaan sistem informasi lingkup Kementan Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi Pusdatin melakukan sosialisasi dan bimtek singkat ke Provinsi Bali pada tanggal 2-4 September 2024. Terdapat 3 satuan kerja yang dikunjungi yaitu, Balai Pembibitan

Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar, Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Bali.

Penerapan CMS Kementan memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi pengelolaan informasi pertanian. Pertama, kemudahan pengelolaan yaitu website satuan kerja dapat dikelola dengan lebih mudah dan efisien, tanpa memerlukan anggaran pemeliharaan tahunan yang besar. Kedua, dukungan keamanan, yaitu sistem keamanan yang terintegrasi melindungi website dari ancaman dan celah keamanan, selama versi CMS tetap diperbarui. Ketiga, standarisasi tampilan, yaitu menerapkan tampilan website yang konsisten dan sesuai dengan standar Pusdatin, menciptakan identitas visual yang kuat dan profesional. Keempat, efisiensi anggaran, yaitu mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan website, anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih strategis.



Sosialisasi CMS Kementan di BPSIP Bali, Tengku Ardhianzah (ketiga dari kiri) ketua Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi Pusdatin sedang memaparkan manfaat dari CMS Kementan (2/9/2024)

CMS yang saat ini dikembangkan oleh Pusdatin versi terbaru adalah versi 1.7. Versi ini hadir dengan sejumlah fitur baru yang canggih, termasuk opsi tampilan yang lebih modern dan responsif, menu dinamis yang dapat disesuaikan, *chatbot* otomatis untuk menjawab pertanyaan pengunjung, *dashboard* analitik yang komprehensif, serta fitur aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

"CMS Kementan versi 1.7 merupakan langkah besar dalam transformasi digital sektor pertanian," ujar Ketua Tim Kerja Aplikasi Sistem Informasi (ASI), Tengku Ardhianzah Dewantara Silang. "Dengan *platform* ini, kami berharap dapat memberikan informasi

pertanian yang lebih mudah diakses, akurat, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia," lanjut Ardhianzah pada Sosialisasi CMS Kementan di BSIP Bali (3/9/2024).

Salah satu fitur unggulan dari CMS Kementan versi 1.7 adalah chatbot otomatis yang dapat memberikan respon cepat terhadap pertanyaan pengunjung berdasarkan kata kunci tertentu. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan pelayanan publik, memberikan informasi yang dibutuhkan secara instan dan akurat.



Sosialisasi CMS Kementan di BBVet Denpasar, Brantas Pranata Nusa (paling kanan) Penanggung Jawab Teknis Pengembangan CMS Kementan sedang memberikan penjelasan teknis tentang CMS

Fitur unggulan lainnya yaitu *dashboard* analitik yang komprehensif. Dashboard ini menyediakan laporan lengkap mengenai jumlah tampilan konten, durasi baca konten, dan statistik kunjungan CMS, membantu pengelola website dalam menganalisis kinerja dan mengoptimalkan konten.

CMS Kementan merupakan langkah penting dalam modernisasi pengelolaan informasi pertanian di Indonesia. Dengan fitur-fitur canggih dan manfaat yang signifikan, CMS Kementan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi pertanian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sektor pertanian memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Penyediaan informasi pertanian yang akurat dan terkini sangat penting bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Dengan CMS Kementan, informasi mengenai program pemerintah, teknologi pertanian, harga komoditas, dan berbagai informasi penting lainnya dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Meskipun CMS Kementan menawarkan banyak manfaat, penerapannya juga



Asyhadi Laksono Hakim (kedua dari kiri) Pranata Komputer Muda Tim Kerja ASI Pusdatin sedang memberikan penjelasan pada Sosialisasi CMS Kementan di BPTU-HPT Denpasar.

menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, serta kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola website, menjadi tantangan yang perlu diatasi. Namun, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru bagi sektor pertanian. Integrasi CMS Kementan dengan teknologi seperti *big data* dan *artificial intelligence* (AI) dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan pertanian.

Dengan adopsi teknologi digital yang semakin luas, masa depan pertanian Indonesia terlihat cerah. CMS Kementan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pertanian digital yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung upaya Kementan dalam meningkatkan kualitas informasi pertanian melalui pemanfaatan CMS Kementan. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita dapat mewujudkan sektor pertanian yang maju dan berdaya saing di era digital.

Penulis : Nugroho Setyabudhi

## Bawang Putih Temanggung, Mati Segan Hidup Tak Mau

Temanggung, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, telah lama dikenal sebagai salah satu penghasil bawang putih terbesar di Indonesia. Petani bawang putih Temanggung telah memproduksi bawang

putih berkualitas selama bertahun-tahun, menjadikannya salah satu komoditas utama di daerah tersebut. Kabupaten Temanggung ditunjuk sebagai kawasan pengembangan komoditas bawang putih. Kawasan lainnya adalah Sembalun di provinsi Nusa Tenggara Barat. Temanggung menjadi wilayah dengan luasan budidaya bawang putih terluas se-Indonesia yaitu sekitar 1.900 hektare.

Keberhasilan program budidaya di Temanggung menjadi tumpuan harapan suksesnya swasembada bawang putih Indonesia. Luas panen komoditas bawang putih Kabupaten Temanggung menduduki urutan pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 luasan tanam bawang putih sebesar 1.748 hektare dengan produksi 13.803 ton dengan produktivitas 7,89 ton/hektare. Pada tahun 2023 luas tanaman menurun menjadi 1.470 hektare dengan produksi 10.493 ton dengan produktivitas sekitar 7,2 – 7,3 ton/hektare. Beberapa kecamatan di Temanggung dengan potensi pengembangan yang cukup baik yaitu di Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo, Bulu, Parakan, Kledung, Bansari, Ngadirejo, Candiroto, Wonobojo dan Tretap.

Kondisi alam Kabupaten Temanggung sangat mendukung untuk budidaya bawang putih. Dengan ketinggian 500–1.450 m di Atas Permukaan Laut (DPL) dan curah hujan rata-rata 1.000 – 3.100 mm/tahun bawang putih dapat tumbuh dengan baik di Temanggung. Bawang putih cocok ditanam di dataran tinggi, dimana sebagian besar adalah daerah tegalan yang tersebar di lereng Gunung Sumbing, Sindoro dan Prau. Sistem pengairan daerah tegalan adalah mayoritas tadah hujan, sehingga untuk waktu tanam dipilih pada musim penghujan yaitu pada bulan Oktober sampai Desember. Hal ini berdampak pada frekuensi penanaman hanya bisa satu kali dalam satu tahun. Varietas bawang putih yang ditanam petani Temanggung umumnya adalah varietas Lumbu Kuning dan Lumbu Hijau.

Selama ini, bawang putih Temanggung menghadapi tantangan yang cukup berat, seperti adanya perubahan iklim berupa kekeringan yang membuat gagal panen. Penyakit seperti busuk akar dan embun tepung yang merusak tanaman dan

mengurangi hasil panen serta harga yang kurang bersaing turut menjadi kendala budidaya bawang putih. Ukuran umbi bawang putih lokal ini berkisar 3-5 cm, relatif kecil dibandingkan bawang putih impor yang umumnya diatas 5 cm. Namun kualitas produk bawang putih lokal cukup bagus dimana aroma dan rasanya lebih kuat dibandingkan bawang putih impor. Umbi yang lebih kecil tapi rasa dan aromanya lebih kuat menjadi alasan lebih hemat dalam pemakaiannya untuk bumbu dapur.



*Seorang warga Desa Petarangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung menjemur bawang putih. Sumber foto ANTARA/Heru Suyitno*

Impor bawang putih juga masih menjadi yang terbesar dibandingkan komoditas hortikultura lainnya. Ketergantungan pasokan bawang putih dari Tiongkok masih terjadi sampai saat ini namun telah diupayakan untuk dikurangi dengan melakukan penanaman di dalam negeri. Kebijakan pengembangan bawang putih di dalam negeri dilaksanakan melalui kebijakan wajib tanam oleh importir dan melalui dana APBN. Produksi bawang putih dalam negeri sampai saat ini masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih dan belum bisa untuk kebutuhan konsumsi.

Adanya persyaratan wajib tanam bagi importir bawang putih, membawa dampak banyak petani di Temanggung yang menjadi mitra tanam importir tersebut. Sekitar 500 hektar lahan tahun 2023 yang ditanami bawang putih bekerjasama dengan importir. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) antara importir dan petani. Hasil panen bawang putih ini kebanyakan digunakan untuk bibit.

Pengumpulan data dukung terkait bawang putih dilakukan oleh Tim Kerja Data Ekonomi

Pertanian Pusdatin di Temanggung pada Selasa (27/08/2024) sampai Jumat (30/08/2024). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kajian perbaikan perhitungan neraca pangan komoditas hortikultura, utamanya komoditas yang mempengaruhi inflasi yaitu bawang merah, bawang putih dan cabai dipilih menjadi komoditas yang diamati. "Kegiatan kajian ini bertujuan untuk perbaikan angka konversi susut dan wujud produksi bawang merah, bawang putih dan cabai," kata Ketua Tim Kerja Data Ekonomi Pertanian Sri Wahyuningsih.

Terobosan yang diterapkan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah dengan menggandeng *champion* untuk membantu pemerintah menstabilkan pasokan dan harga saat terjadi gejolak. Langkah ini dinilai berhasil oleh berbagai pihak dan telah memberi warna menarik dalam grafik inflasi nasional khususnya angka inflasi yang disumbangkan oleh bahan makanan.

Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Sumarno mengatakan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk komoditas bawang putih di Temanggung. "Jaringan pemasaran dan kemitraan menjadi sarana utama dalam penyerapan hasil panen bawang putih dan pengendalian harga dan inflasi, sehingga kelompok tani perlu difasilitasi untuk bisa memiliki jaringan tersebut," demikian kata Sumarno. Ketersediaan benih bawang putih dan jumlah petani penangkar benih bawang putih yang terbatas juga perlu menjadi perhatian. Budidaya bawang putih memerlukan budidaya yang ramah lingkungan, sementara ketersediaan pupuk organik ramah lingkungan masih terkendala dengan ketersediaan bahan baku. Hal tersebut dapat disiasati dengan menciptakan kolaborasi dengan bidang peternakan.

Sumarno menyampaikan ada beberapa langkah tindak lanjut untuk pengembangan bawang putih di Kabupaten Temanggung antara lain pembinaan intensif kepada petani dengan dukungan pendanaan memadai. Pengembangan benih dan penangkar dengan mengutamakan spesifik lokal dan unggul juga perlu

dilakukan. Di samping itu perlu ditegaskan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan input lengkap yang meliputi mekanisasi pertanian, penanganan pascapanen dan sarana gudang, bangsal pascapanen, pemberdayaan atau penguatan kelembagaan tani (Poktan, Gapoktan, Asosiasi, Konsorsium), serta kerjasama dan kemitraan agribisnis.

Pengamatan lapangan di Kabupaten Temanggung dilakukan di 5 kecamatan sentra bawang merah, bawang putih dan cabai (cabai merah keriting dan cabai rawit) yaitu Kecamatan Tlogo Mulyo, Kledung, Bansari, Ngadirejo dan Bulu dengan total sampel sebanyak 22 responden. Pengamatan dilakukan melalui wawancara kepada petani dan pedagang. Satu *champion* Temanggung yang diwawancarai adalah Supriyanto dari Kecamatan Bansari selaku pedagang bawang putih.



Bawang putih yang sudah dormant untuk bibit di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung

Bawang produksi bibit tadi dijual ke pedagang pengepul dengan harga jual Rp 12.000 per kg untuk konde kering jemur 3-7 hari dan bawang putih kering dormant simpan 5-6 bulan (untuk bibit) Rp 30.000 per kg. Sementara harga jual bawang putih konde basah habis panen hanya Rp 9.000/kg. Konversi bawang putih wujud panen konde hijau (daun basah) umur panen 105 hari ke konde kering disimpan 5-7 hari sekitar 70 persen atau susut 30 persen dan apabila disimpan 5-6 bulan (untuk bibit) susut sekitar 50 persen. Perkiraan biaya produksi mulai dari pembelian bibit, tenaga kerja (pengolahan tanah, buat bedeng, pemasangan mulsa,

tanam, pemupukan, penyemprotan dan panen), beli pupuk, beli pestisida, mulsa, sewa lahan dan pengangkutan pupuk dan hasil panen dengan luasan 0,3 hektare sekitar Rp 13.960.000 dengan hasil produksi sekitar Rp 15.600.000. Marjin ini dirasakan masih terlalu kecil dibandingkan komoditas pertanian lainnya.

Adi Handoko, petani bawang putih desa Katekan Kecamatan Ngadirejo mengatakan bahwa kegiatan tanam terakhir seluas 1 hektare. Adi juga bermitra dengan importir secara kelompok menggarap luas lahan sebanyak 10 hektare. "Volume bibit yang dibutuhkan untuk menanam sekitar 400-500 kg per hektare dengan varietas Lumbu Kuning. Bibit ini adalah produksi yang disimpan dari hasil panen sebelumnya," kata Adi. Lebih jauh Adi menyampaikan bahwa penanaman dilakukan sekali setahun pada bulan November. Usia tanam bawang putih sekitar 90-100 hari sehingga panen dilakukan pada bulan Februari. Namun untuk penanaman yang bermitra dengan importir, tahun ini periodenya mundur ke bulan Januari sehingga periode tanam komoditas lain juga mundur. Pada kerjasama dengan importir, biaya tenaga kerjaditanggung oleh petanisendiri. Importir hanya menanggung biaya bibit, pupuk dan obat dengan bagi hasil 70 persen untuk petani dan 30 persen untuk mitra (importir).

Masih menurut Adi, produksi bawang putih pada luas lahan 1 hektare yaitu sebanyak 6 ton dalam wujud konde hijau. Harga jual panen saat ini adalah Rp 10.000 – Rp 12.000 per kg dalam wujud konde hijau. Harga tersebut cenderung lebih stabil dibandingkan harga bawang merah. Jika hasil panen tersebut dijual untuk konsumsi dalam wujud rogol, harga jualnya sekitar Rp 20.000 – Rp 25.000 per kg. "Jika simpan selama 8-10 bulan untuk bibit, maka harganya menjadi Rp 30.000 – Rp 35.000 per kg," kata Adi lebih jauh. Berdasarkan perkiraan petani, konversi wujud konde hijau menjadi konde kering yang disimpan 1 bulan sekitar 50 persen. Artinya dari 100 kg konde hijau menjadi 50 kg konde kering. Lebih lanjut dari konde kering menjadi rogol kering konversinya sekitar 90 persen. Berbeda dengan bawang merah, perkiraan tercecawang putih di sawah yaitu sekitar 1

persen karena tidak terbawa saat mencabut. Umbi bawang putih saat panen biasanya masih berada di dalam tanah, sehingga terkadang ada umbi yang tidak tercabut. Berbeda dengan umbi bawang merah saat usia panen, umbinya telah muncul ke permukaan tanah sehingga kemungkinan untuk tidak tercabut sangat kecil.

Bawang putih Indonesia khususnya Temanggung saat ini memang berada dalam situasi yang sulit. Perdagangannya kalah saing dengan bawang putih impor, sementara keuntungan petani dari hasil usahanya masih belum mampu meningkatkan kesejahteraannya. Namun, dengan upaya yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, masih ada harapan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Inovasi teknologi, pendidikan, dan dukungan infrastruktur yang memadai akan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa bawang putih Temanggung dapat kembali tumbuh dengan subur dan berkontribusi pada perekonomian lokal serta dunia kuliner Indonesia. Hal ini sesuai dengan master plan Kementan dimana program swasembada bawang putih sesuai akan terlaksana pada 2028.

Penulis : Sehusman

## **Serapan Tenaga Kerja Tinggi, Ciptakan Sektor Pertanian Yang Padat Karya**

Sektor pertanian adalah sektor yang padat karya karena dapat menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2024 jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia sekitar 142,18 juta jiwa. Sebanyak 28,64 persen dari jumlah tersebut bekerja di sektor pertanian luas mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan. Pengumpulan data ketenagakerjaan sektor pertanian ini dilakukan oleh BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dalam perencanaan pembangunan pertanian, data ketenagakerjaan memegang peranan penting sehingga program pembangunan pertanian dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Faktor

kekuatan sumber daya manusia menurut kelompok umur atau ketenagakerjaan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan nasional Indonesia.



Tenaga kerja disektor pertanian

Sakernas BPS dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada Februari dan Agustus. Data Sakernas Februari 2024 dikumpulkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan jumlah sampel sebanyak 75.000 Rumah Tangga yang diambil dari 7.500 Blok Sensus (BS). Tenaga kerja pertanian dalam arti sempit (tanpa perikanan dan kehutanan) merupakan tenaga kerja terbesar mencapai 38,29 juta orang atau 26,94 persen dari total penduduk yang bekerja. Jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2023 yaitu sebesar 38,14 juta orang, maka angka tersebut mengalami peningkatan 0,39% atau sebanyak 148 ribu jiwa. Tenaga kerja tersebut tersebar ke dalam empat subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan, pada Bulan Februari 2024 sebesar 20,46 juta orang (53,45 persen) dari total pekerja sektor pertanian sempit. Subsektor ini menyerap tenaga kerja paling banyak dibanding subsektor lainnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Februari 2023), mengalami peningkatan 2,43 persen. Sementara itu penduduk yang bekerja di subsektor perkebunan pada Februari 2024 sebesar 10,08 juta orang (26,33 persen) dari

total tenaga kerja di sektor pertanian sempit. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (Februari 2023) yaitu sebesar 10,36 juta orang. Penduduk yang bekerja di subsektor peternakan pada Februari 2024 mencapai 4,29 juta orang (11,20 persen) dari total pekerja sektor pertanian sempit. Seperti halnya perkebunan, jumlah ini turun 0,68 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (Februari 2023). Berikutnya untuk sub sektor hortikultura, penduduk yang bekerja di subsektor ini pada Februari 2024 sebesar 3,45 juta orang (9,02 persen) dari total tenaga kerja sektor pertanian sempit. Angka ini juga turun 3,11 persen dibandingkan Februari 2023.

Sektor pertanian ditengarai memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, walaupun mampu menyerap jumlah tenaga kerja terbesar. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada tahun 2024 sektor pertanian hanya mampu berkontribusi 8,69 persen (angka sangat sangat sementara) terhadap PDB nasional triwulan I 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian yang bekerja di sektor hulu masih relatif rendah. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan terhadap adopsi teknologi. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas. Upaya tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar langkah-langkah yang diambil sesuai sasaran.

Penulis : Heri Dwi Martono

## Temu Bisnis P3DN VIII 400 Triliun Rupiah Transaksi, Dalam 2 Hari

**A**cara Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) VIII yang diselenggarakan di Indonesia *Convention Exhibition* (ICE) BSD City pada tanggal 17 dan 18 September 2024 telah menarik perhatian pelaku usaha dari berbagai sektor industri. Acara ini menjadi

salah satu *platform* terbesar di Indonesia untuk mempertemukan pengusaha, investor, serta profesional dari berbagai bidang, guna mendukung program pemerintah untuk belanja produk dalam negeri serta mendukung tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan perekonomian nasional dan mempromosikan produk lokal. Tentu saja hal tersebut sangat berkaitan dengan upaya mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini memiliki tema besar "Membangun Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan Melalui Inovasi dan Kolaborasi". Acara ini juga dirancang untuk mendorong pelaku usaha agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan ekonomi global, digitalisasi, dan tren industri 4.0. Banyak perusahaan ternama yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, seperti PT. Telkom Indonesia, PLN, Bank Mandiri, Astra International dan PT. Pindad. Dengan partisipasi yang luas, acara ini diharapkan dapat menghasilkan kerja sama bisnis baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



*Sambutan Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan*

Dalam sambutannya pada acara pembukaan Temu Bisnis VIII P3DN, Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Temu Bisnis P3DN VIII akan menjadi bagian dari program yang dapat diwariskan ke pemerintahan selanjutnya dan sebagai upaya untuk menguatkan digitalisasi pada pengadaan barang dan jasa di dalam negeri.

Dalam acara tersebut, Luhut didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo.

Selanjutnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ketika dimintai keterangan menyampaikan bahwa pemanfaatan layanan teknologi menjadi kunci sekaligus kekuatan utama dalam memperkuat produk lokal Indonesia terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian. "Saya selalu katakan bahwa teknologi itu mempermudah yang sulit. Karena itu saya ingin temu bisnis ini menambah kekuatan kita dalam mendahulukan kepentingan Indonesia dan kepentingan rakyat di masa yang akan datang," ujar Wamentan Sudaryono setelah acara pembukaan di sela-sela peninjauan kegiatan Temu Bisnis P3DN tahap VIII.

### **Harapan dan Dampak**

Melalui Temu Bisnis P3DN VIII, penyelenggara berharap dapat memfasilitasi ekosistem bisnis yang lebih kuat dan terhubung, di mana inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, acara ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak perusahaan untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada Temu Bisnis P3DN VIII, Kementerian Pertanian memainkan peran yang sangat penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan sektor pertanian sebagai salah satu bidang ekonomi strategis yang berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Keterlibatan Kementerian Pertanian dalam acara ini menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kolaborasi antar sektor, memperkuat ekosistem agribisnis, serta mendorong inovasi di bidang pertanian.

Kementerian Pertanian memanfaatkan forum Temu Bisnis P3DN VIII untuk memperkenalkan berbagai inovasi teknologi terbaru di bidang pertanian. Teknologi ini meliputi pertanian cerdas (*smart farming*), digitalisasi pertanian, serta

alat-alat pertanian modern yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor ini. Pameran inovasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku industri, tetapi juga kepada investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor agribisnis. Kementerian Pertanian juga menginisiasi sesi *Business Matching*, untuk mempertemukan pelaku agribisnis dengan para pemilik anggaran di Kementerian-Kementerian serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Momen ini dianggap paling penting, karena seperti diketahui bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat terkait kepatuhan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) selama kurun 2023 masih perlu diperbaiki. Sebagai tambahan, dari 460 Kementerian/Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah hanya 94 yang kepatuhannya dinilai cukup baik, sementara 366 instansi lainnya harus memperbaiki proses perencanaan dan implementasi PDN di internal masing-masing.

Sebagai bagian dari agenda *workshop* dan diskusi, Kementerian Pertanian berkesempatan memaparkan sejumlah program pemerintah yang mendukung pengembangan petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian. Program-program ini meliputi bantuan teknologi, akses pembiayaan, hingga pelatihan kewirausahaan. Dengan demikian, para pelaku usaha pertanian dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan meningkatkan produktivitas mereka.

Salah satu peran penting Kementerian Pertanian dalam acara ini adalah menyampaikan kebijakan dan rencana strategis terkait pertanian yang berkelanjutan. Kementerian Pertanian menyoroti upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian, mengatasi perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional. Acara ini juga digunakan sebagai *platform* untuk mendapatkan umpan balik dari para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait kebijakan yang sedang dan akan diterapkan.

Dengan berperan aktif dalam Temu Bisnis P3DN VIII, Kementerian Pertanian

berharap dapat memperkuat kolaborasi antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lain seperti teknologi, finansial, dan manufaktur. Secara keseluruhan, peran Kementerian Pertanian dalam acara ini menunjukkan tekad kuat untuk mendukung penggunaan produksi dalam negeri, yang ditujukan untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, modern, dan berkelanjutan, serta menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Berikutnya di hari ke-2 pada kesempatan penutupan acara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil menyampaikan apresiasi kepada pelaku bisnis nasional yang telah melakukan transaksi. Temu Bisnis P3DN VIII mencatatkan transaksi Rp 440,2 triliun, melampaui target sekitar Rp 300 triliun sebagaimana yang ditargetkan sebelumnya oleh Menkomarves, Luhut Panjaitan. "Harapan kita sekali lagi mudah-mudahan pertemuan dua hari ini memberi manfaat kepada semua pihak baik dari pemerintah, privat atau teman-teman di UMKM yang mempunyai produk dalam negeri sebagaimana tadi tema yang sudah disampaikan dalam pertemuan di awal," ungkap Ali Jamil.

Penulis : Apriadi Setiawan



[satudata.pertanian.go.id](http://satudata.pertanian.go.id)